



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

PENGUATAN AKUNTABILITAS

MAHKAMAH KONSTITUSI

PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

2023

PENGUATAN AKUNTABILITAS

DAFTAR ISI

1. Dokumentasi pengisian Sasaran Kinerja (SKP) Bulanan di Aplikasi Dashboard Pegawai apps.mkri.id Tahun 2023
2. Dokumentasi Pengisian Capaian Kinerja Per Bulan di Aplikasi E-Kinerja Pegawai lakip.mkri.go.id Tahun 2023
3. Capaian Kinerja Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Bulan Januari S/D Desember Tahun 2022
4. Undangan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko bagi Risk Officer di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
5. Tata Tertib Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Bagi Risk Officer Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
6. Nota Dinas Pengumpulan Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2021
Nota Dinas Penyampaian Profil Manajemen Risiko Puslitka Tahun 2021
7. Nota Dinas Permohonan Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 165 Tahun 2021 Tentang Risk Officer Manajemen Risiko Pada Unit Kerja Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021
9. Nota Dinas Usulan Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
10. Nota Dinas Laporan persiapan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
Surat Kick off meeting Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI tahun 2021
11. Nota Dinas Penyampaian Surat Nomor B/17/RB.01/201 Tanggal 13 Agustus 2021 Hal Kick off meeting Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2021 dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB

Dashboard SKP Bulanan, Input Kegiatan Bulanan, E Kinerja

SOSIALISASI

ABSENSI ONLINE WORK FROM HOME/OFFICE

Instal Dashboard Pegawai

Peta Jabatan Informasi Cuti

SKP PRIBADI

- Beranda
- SKP Tahunan
- SKP Bulanan
- Input Kegiatan

SKP Bawahan

- Erna Hasanah
- Medi Kurniadi
- Ofiziana Tri Hastuti
- Siti Rosmalina Nurhayati
- Adam Ilyas
- Selma Andana

Kegiatan

Kegiatan di Bulan Mei 2023

Pilih Bulan: Mei

No. Keg.	Nama Kegiatan	Kualitas/ Kuantitas	Satuan	Tugas Tambah	Proses/Selesai
1 107465	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi Bulan Mei 2023	6 dari 6 kuantitas bulanan	Laporan	Tidak	Selesai
Keterangan:					
Catatan:					
2 107468	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tinjauan Yuridis Perkara Mei 2023	12 dari 12 kuantitas bulanan	Laporan	Tidak	Selesai
Keterangan:					
Catatan:					
3 107470	Jumlah Laporan Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) Bulan Mei 2023	12 dari 12 kuantitas bulanan	Laporan	Tidak	Selesai
Keterangan: Sebanyak 10 Perkara					
Catatan:					
4 107471	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Perkara atau Telaah Perkara Bulan Mei 2023	12 dari 12 kuantitas bulanan	Laporan	Tidak	Selesai
Keterangan: Pembuatan Surat Tugas, Administrasi E-Asli					
Catatan:					
5 107472	Laporan Pelaksanaan Seminar/ Focus Group Discussion/ Workshop/ Call for paper	8	Laporan	Tidak	

SOSIALISASI

ABSENSI ONLINE WORK FROM HOME/OFFICE

Instal Dashboard Pegawai

Peta Jabatan Informasi Cuti

SKP PRIBADI

- Beranda
- SKP Tahunan
- SKP Bulanan
- Input Kegiatan

SKP Bawahan

- Erna Hasanah
- Medi Kurniadi
- Ofiziana Tri Hastuti
- Siti Rosmalina Nurhayati
- Adam Ilyas
- Selma Andana

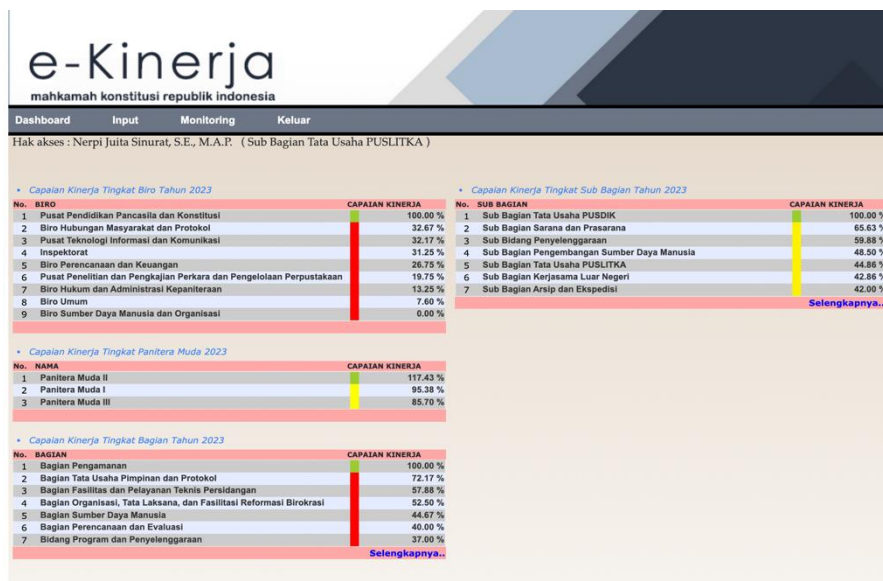
bulanan

Target Bulan Mei Tahun 2023

Pilih Bulan: Mei

No. Id.	Target Bulanan	Kualitas/ Kuantitas	Satuan	Tugas Tambah	Realisasi Bulanan	ACC Atasan	Edit/Hapus
1 80742	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi	6 dari 6 kuantitas target tahunan	Laporan	Tidak	6	Disetujui	
2 80743	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Tinjauan Yuridis Perkara Mei 2023	12 dari 12 kuantitas target tahunan	Laporan	Tidak	12	Disetujui	
3 80744	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Perkara atau Telaah Perkara Bulan Mei 2023	12 dari 12 kuantitas target tahunan	Laporan	Tidak	12	Disetujui	
4 80745	Jumlah Laporan Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) Bulan Mei 2023	12 dari 12 kuantitas target tahunan	Laporan	Tidak	12	Disetujui	
5 80746	Jumlah Laporan Pelaksanaan Seminar/ Focus Group Discussion/ Workshop/ Call for paper	8 dari 8 kuantitas target tahunan	Laporan	Tidak	8	Disetujui	
6 80747	Laporan Artikel Jurnal Konstitusi yang direview Bulan Mei 2023	10 dari 10 kuantitas target tahunan	Artikel/ Laporan	Tidak	10	Disetujui	
7 80748	Laporan Artikel Jurnal Constitutional Review yang direview Mei 2023	4 dari 4 kuantitas target tahunan	Artikel/ Laporan	Tidak	4	Disetujui	

Dashboard SKP Bulanan, Input Kegiatan Bulanan, E Kinerja



e-Kinerja
mahkamah konstitusi republik indonesia

Dashboard | Input | Monitoring | Keluar

Hak akses : Nerpi Juita Sinurat, S.E., M.A.P. (Sub Bagian Tata Usaha PUSLITKA)

CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023

CARI: December | SACARAN: | Cari

Tambah Sasaran | Ambil | Cetak Ringkas | Cetak Lengkap

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA			%	KET	PENERAPAN ANGGARAN			
			BULAN LALU	REALISASI BULAN DESEMBER	TOTAL			PAGU	REALISASI	SISA	%
1. Tersedianya Dokumen Substantif Dukungan Pembahasan Putusan Perkara yang Relevan Edit Hapus	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi Tambah Indikator Edit Hapus Berkas	6 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	33 %	Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi	Rp.177,470,000	Rp.0	Rp.177,470,000	0 %
							Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi dan Pendampingan Penelitian Mahasiswa				
							Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi				
							Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi				
							Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Studi Tentang Perkara dan Konstitusi				



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Program RB Area Penguatan Akuntabilitas

NOTA DINAS

NOMOR 500//PR.15.01/01/2023

Kepada : Bapak Plt. Sekretaris Jenderal MK RI
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Laporan Tingkat Kepatuhan Unit Kerja dan Nilai Capaian Kinerja Individu
Berdasarkan Aplikasi e-Kinerja Triwulan IV Tahun 2022
Tanggal : 13 Januari 2023

Pengumpulan data kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi capaian kinerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Kepaniteraan oleh Panitera Muda I, Panitera Muda II, Panitera Muda III, Panitera Pengganti Tingkat I, dan Panitera Pengganti Tingkat II berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun. Data Capaian Kinerja disusun di lingkungan Sekretariat Jenderal berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tiap awal tahun yang disusun oleh Kepala Biro/Pusat (Eselon II), Kepala Bagian/Bidang (Eselon III), Kepala Sub Bagian/Sub Bidang (Eselon IV), sampai dengan level staf (individu).

Data Capaian Kinerja dilaporkan secara berkala setiap bulan melalui sistem aplikasi e-Kinerja. Berikut ini hasil evaluasi capaian kinerja berdasarkan input aplikasi e-Kinerja. Pengukuran kinerja ini dilaksanakan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Berikut data capaian kinerja unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK pada Triwulan IV Tahun 2022 (Periode Rekapitulasi tanggal 13 Januari 2023):



I. Capaian Kinerja Kepaniteraan Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Triyono Edy Budhiarto	Panitera Muda I	156.88%
2	Wiryanto	Panitera Muda II	163.86%
3	Ida Ria Tambunan	Panitera Muda III	148%
4	Saiful Anwar	Panitera Pengganti Tk. I	106.88%
5	Rizki Amalia	Panitera Pengganti Tk. I	106.88%
6	Syukri Asy'ari	Panitera Pengganti Tk. I	106.88%
7	Hani Adhani	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
8	Mardian Wibowo	Panitera Pengganti Tk. II	108.25%
9	Ria Indriyani	Panitera Pengganti Tk. II	107.86%
10	Achmad Edi Subiyanto	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
11	Wilma Silalahi	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
12	Ery Satria Pamungkas	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
13	Yunita Rhamadani	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
14	Anak Agung Dian Onita	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
15	Dian Chusnul Chatimah	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
16	Fransisca	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
17	Nurlidya Stephanny Hikmah	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
18	Jefri Porkonanta Tarigan	Panitera Pengganti Tk. II	106.88%
19	Rahadian Prima Nugraha	Panitera Pengganti Tk. II	100%
20	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa	Panitera Pengganti Tk. II	101.25%

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Kepaniteraan, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.



II. Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Tatang Garjito	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	100.88%
2	Endrizal	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	94.83%
3	Budi Hari Wibowo	Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran	100%
4	Sylvia Yuliani	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	100%
5	Aris Wahyu Hajianto	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	100%
6	Khurin'in Kurnia Putri	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	100%
7	Windu Budiyanto	Analisis Perencanaan Anggaran	100%
8	Romi Sundara	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	100%
9	Chandra Okantara	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%
10	Siska Yuniza	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%
11	Santi Widiastuti	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%
12	Isti Widayanti	Kepala Bagian Keuangan	100%
13	Maria Ulfah Kusumaastuti	Kepala Sub Bagian Verifikasi	100%
14	Nur Hasanah	Verifikator Keuangan	100%
15	Ruccy Susanto	Verifikator Keuangan	100%
16	Yuni Nurhayati	Kepala Sub Bagian Perbendaharaan	100%
17	Andi Aprilla Megananda Sanusi	Bendahara	100%
18	Irvan Afrialdi Awaludin Muchtar	Bendahara	100%
19	Eliza	Bendahara	100%
20	Dessy Citrawaty Mursito	Bendahara	100%
21	Sarah	Bendahara	100%
22	Elin Asrofah Qibtiah	Bendahara	100%
23	Nurdani Hidayati	Pengolah Daftar Gaji	106.25%
24	Renando Piany Fazardo	Analisis Aplikasi Dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	100%
25	Syarief Hidayatullah Az Zaky	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan	100%
26	Tania Nitrina Nanda Lawi	Penyusun Laporan Keuangan	100%
27	Allita Prisantama	Penyusun Laporan Keuangan	100%
28	Debby Yelviona	Analisis Keuangan	100%

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Biro Renkeu, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.



III. Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Kurniasih Panti Rahayu	Plt. Inspektur	100%
2	Arshintia Fitridiyani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	110%
3	Dhita Cantika Megatania	Auditor Ahli Muda	109.38%
4	Dian Dwi Hapsoro	Auditor Ahli Muda	120%
5	Surya Murni Pangesti Lestari	Auditor Ahli Pertama	107.14%
6	Dwi Poesvitasari	Auditor Ahli Pertama	125%
7	Muhammad Rizki	Auditor Ahli Pertama	127.75%
8	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.	Auditor Ahli Pertama	100%
9	Amelia Desy Ratna Yuwita	Auditor Ahli Pertama	100%
10	Dillon Davin Zebadiah	Auditor Ahli Pertama	103.57%
11	Wijang Ardi Rahmadi	Auditor Ahli Pertama	100%
12	Andi Siti Chadidjah Baso	Auditor Ahli Pertama	100%

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} = \frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Inspektorat, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.



IV. Capaian Kinerja Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Tatang Garjito	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	107.13%
2	Ina Zuchriyah	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	106.25%
3	Dewi Hastuti	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	100%
4	Rahmadiani Putri Nilasari	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100%
5	Lia Nur Jannah	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100%
6	Arinta Sulistiyono Eko P.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	100%
7	Haifa Arief Lubis	Analisis Hukum	100%
8	Muhammad Ramlan Aminuddin	Analisis Hukum pada Panitera	100%
9	Grenata Petra Claudia	Analisis Hukum	100%
10	Aditya Yuniarti	Analisis Hukum pada Panitera	100%
11	Paulus Rudy Calvin Sinaga	Analisis Hukum Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah	100%
12	Puguh Apriyanto	Analisis Hukum	100%
13	Dewi Hastuti	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepaniteraan	100%
14	Juliana Tikka Murni	Analisis Tata Usaha	100%
15	Mohammad Chamid Zuhri	Analisis Tata Usaha	100%
16	Johan Yustisianto	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	102%
17	Yohana Citra Permatasari	Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan	100%
18	Rita	Pengadministrasi Registrasi Perkara	100%
19	Syamsudin Noer	Pengadministrasi Registrasi Perkara	100%
20	Nuzul Qur'aini Mardiyah	Pengadministrasi Registrasi Perkara	100%
21	Andhyta Andam Nadia	Pengadministrasi Registrasi Perkara pada Panitera	100%
22	Supriyanto	Pengelola Persidangan	100%
23	Siska Yosephin Sirait	Pengelola Persidangan	100%
24	Alifah Rahmawati	Pengelola Persidangan	100%
25	Achmad Dodi Haryadi	Pengelola Persidangan	100%
26	Ditya Zuliana	Pengelola Persidangan	100%
27	Aqmarina Rasika	Pengelola Persidangan	100%
28	Hermita Uly Artha Sinurat	Pengolah Data Perkara dan Putusan	100%
29	Siswantana Putri Rachmatika	Pengolah Data Perkara dan Putusan	100%
30	Khairuddin	Pengolah Data Perkara dan Putusan	100%
31	Indah Karmadaniah	Pengolah Data Perkara dan Putusan	100%
32	Muhamad Doni Ramdani	Pengolah Data Perkara dan Putusan	100%
33	Suryo Gilang Romadlon	Plt. Sekretaris Jenderal	100%
34	Rosalia Agustin Shella Hendrasmaras	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat	100%
35	Agusniwan Etra	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	100%
36	Muchtar Hadi Saputra	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra	100%
37	Riani Anggraini	Pengolah Data Perkara dan Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman	100%
38	Ganggas Wibisono	Pengolah Data Perkara dan Putusan Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman	100%
39	Rika Dewi Andryani	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Manahan M. P. Sitompul	102.25%
40	Amriansyah Maulana	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	100%
41	Hersinta Setiarini	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	100%
42	Yunita Nurwulantari	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	100%
43	Rio Tri Juli Putranto	Juru Panggil	100%
44	Fenny Tri Purnamasari	Juru Panggil	100%
45	Evi Soraya Eka Putri	Cuti Sakit	-



$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} = \frac{44}{44} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Biro HAK, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.



V. Capaian Kinerja Biro Humas dan Protokol Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Heru Setiawan	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	104.22%
2	Fajar Laksono	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri	100%
3	Mutia Fria Darsini	Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat	100%
4	Andhini Sayu Fauzia	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	100%
5	Tiara Agustina	Pengelola Media Center dan Kemitraan Media	100%
6	Fitri Yuliana	Analisis Publikasi	100%
7	Raisa Ayuditha Marsaulina	Analisis Berita	100%
8	Muhammad Halim	Analisis Sistem Informasi Dan Desiminasi Hukum	100%
9	Yossy Adriva	Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga	100%
10	Widi Atmoko	Analisis Kerja Sama	125%
11	Yogi Djatnika	Analisis Hubungan Antar Lembaga	158.33%
12	Adam Tansyah	Analisis Hubungan Antar Lembaga	116.67%
13	Lambang Tri Sulistiyo	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerjasama	100%
14	Annisa Lestari	Analisis Tata Usaha	100%
15	Sri Handayani	Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri	104%
16	R.A. Indah Apriyanti	Kepala Sub Bagian Sekretariat Tetap AACC	125%
17	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri	116.67%
18	Sherly Octaviana Sari	Analisis Kerjasama Luar Negeri	100%
19	Rizky Kurnia Chaesario	Analisis Informasi Perencanaan Kerjasama Luar Negeri	100%
20	Budi Wijayanto	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	106%
21	Hasri Puspita Ainun	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	100%
22	Didi Ahmadi	Sekretaris Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman	100%
23	Hari Kusuma Yuda Tama	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	100%
24	Intan Yuri Susanti	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Wahidudin Adams	100%
25	Iman Sudjudi	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	100%
26	Niniek Widiyanti	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	100%
27	Donny Yuniarto	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra	100%
28	Abdul Mun'im Wasi'	Sekretaris Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	100%
29	Rumaisha	Sekretaris pada Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi	100%
30	Gunawan	Kepala Sub Bagian Protokol	100%
31	Syarief Hidayatullah	Petugas Protokol	100%
32	Denny Feishal	Petugas Protokol	100%
33	Donny Hazny Mourad	Petugas Protokol	100%
34	Lutfi Yudhistira	Petugas Protokol	100%
35	Prana Patrayoga Adiputra	Petugas Protokol	100%
36	Yuniar Pramudiyarsi	Petugas Protokol	100%
37	Avicenna Nindya Perwitasari	Petugas Protokol	100%
38	Ade Kurniawan	Petugas Protokol	100%



$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Biro Humas dan Protokol, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.

VI. Capaian Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Teguh Wahyudi	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	81.08%
2	Anny Oedjianti	Dokter Gigi Ahli Muda	100%
3	Andi Hakim	Manusia	100%
4	Dede Agustina Naibaho	Kepala Sub Bagian Administrasi Hakim dan Pegawai	100%
5	Verra Yunita Mamonto	Dokter Ahli Pertama	50%
6	Annisa Aska	Perawat Terampil	92%
7	Agni Rahayu	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	100%
8	Nova Ayu Pratiwi	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur	100%
9	Billy Barlian	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	100%
10	Bianca Kartika Sari	Analisis Kesejahteraan SDM Aparatur	100%
11	Hatika Al Shafa	Analisis Kinerja	100%
12	Andi Hakim	Kepala Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%
13	Fithatue Amalia Fatla Aini	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	145%
14	Ariesty Kartika	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	108%
15	Nurbaiti Rohmani	Analisis SDM Aparatur	100%
16	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil	100%
17	Bianca Prakesi Talamati	Pengelola Kepegawaian	100%
18	Nor Rosyid Ardani	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	100%
19	Mastiur Afrilidiany Pasaribu	Kepala Sub Bagian Organisasi dan Tata Laksana	100%
20	Bayu Ardhiansyah	Analisis Organisasi	100%
21	Rd. Muhamad Billy Almalik	Analisis Tata Laksana	100%
22	Rimas Kautsar	Kepala Sub Bagian Fasilitas Reformasi Birokrasi	100%
23	Purwanto	Analisis Kelembagaan	100%

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{21}{23} \times 100\% = 91.30\%$$



Pada unit kerja Biro SDMO, terdapat 2 pegawai yang belum lengkap mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 91.30%.



VII. Capaian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Imam Margono	Pit. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	107.17%
2	Nanang Subekti	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	108%
3	Ardiansyah Salim	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	101%
4	Bangkit Panji Anarogo	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	105%
5	Fazlur Rahman El Islamy	Analisis Kurikulum Dan Pembelajaran	100%
6	Suhardi	Penyusun Kurikulum, Modul Dan Bahan Ajar	100%
7	Edwin Aditya Irawan	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	100%
8	Angga Putri Gardina	Penyusun Kerjasama Pelatihan	100%
9	Santhy Kustrihardiani	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	106.88%
10	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Diklat	101%
11	Imam Margono	Kepala Bagian Umum	102.38%
12	Bambang Sukmadi	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	100%
13	Yahya Amarullah Taufik	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	100%
14	Edwin Rivano	Pengelola Asrama	100%
15	Melati Kusuma Wardani	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100.13%
16	Hadian Taofik Rochman	Pengelola Keuangan	100%
17	Chafid Sugianto	Analisis Tata Usaha	100%

$$\text{Tingkat Kepatuhan pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Pusdik, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.



VIII. Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Kurniasih Panti Rahayu	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	97.36%
2	Hanindyo	Pustakawan Ahli Madya	85%
3	Pan Mohamad Faiz Kusuma W.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra	215%
4	Bisariyadi	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	100%
5	Anna Triningsih	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	153.85%
6	Oly Viana Agustine	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	100%
7	Yuni Sandrawati	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	131.6%
8	Nallom Kumiawan	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman	101.20%
9	Irfan Nur Rachman	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat	115.18%
10	Luthfi Widagdo Eddyono	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat	131.92%
11	Abdul Ghoffar	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	184.25%
12	Winda Wijayanti	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	129.73%
13	Helmi Kasim	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah	33.33%
14	Alboin Pasaribu	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Daniel Yusmic Pancastaki Foekh	100%
15	Mohammad Mahrus Ali	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	121.42%
16	Erlina Maria Christin Sinaga	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	27.27%
17	Rima Yuwana Yustikaningrum	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	110.17%
18	Mery Christian Putri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	110.17%
19	Zaka Firma Aditya	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	137.50%
20	Andriani Wahyuningtyas Novitasari	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Saldi Isra	67.92%
21	Anantha Ayu Devitasari	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	100%
22	M. Lutfi Chakim	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	100%
23	Titis Anindyajati	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	98.75%
24	Rizkisyabana Yulistiyaputri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	160%
25	Muhammad Reza Winata	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	100%
26	Sharfina Sabila	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	160%
27	Intan Permata Putri	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	128.27%
28	Abdul Basid Fuadi	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	100%
29	Yuni Sandrawati	Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi	133.5%
30	Lina Herlina	Pustakawan Ahli Muda	100%
31	Dewi Fitriyani	Pustakawan Ahli Muda	100%
32	Elling Masitoh	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	100%
33	Nerpi Juita Sinurat	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	122.06%
34	Medi Kurniadi	Analisis Tata Usaha	100%
35	Erna Hasanah	Analisis Tata Usaha pada Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah	100%
36	Olfiziana Tri Hastuti	Analisis Tata Usaha	100%



$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{33}{36} \times 100\% = 91.67\%$$

Pada unit kerja Puslitka, terdapat 3 pegawai yang belum lengkap mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 91.67%.



IX. Capaian Kinerja Biro Umum Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Elisabeth	Kepala Biro Umum	95.60%
2	Kasiman	Arsiparis Ahli Madya	100%
3	Sunarti	Arsiparis Ahli Madya	100%
4	Ardli Nuryadi	Plt. Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi	100.83%
5	Ardli Nuryadi	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	105.4%
6	Daryono	Pengelola Kendaraan	100%
7	Ujang Wahyu	Pengelola Kendaraan	100%
8	Jeffry Irwansyah	Pengelola Kendaraan	100%
9	Devi Arika Hapsari	Pranata Jamuan	100%
10	Budi Asmoro	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	100%
11	Wibisana Ferry	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga Dan Perlengkapan	100%
12	Bambang Sugito	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	100%
13	Novena Jati Nugraha	Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas	100%
14	Galuh Tri Astari	Pengelola Bangunan Gedung	100%
15	Kin Isura Ginting	Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi	100%
16	Siwi Kartikasari	Arsiparis Ahli Muda	100%
17	Sri Rustiningrum	Arsiparis Ahli Muda	100%
18	Basuki	Arsiparis Ahli Muda	100%
19	Dewi Rahmawati	Arsiparis Terampil	100%
20	Faizal Fajar Insani	Arsiparis Terampil	100%
21	Ananda Pria	Pengelola Tata Naskah	100%
22	Achmad Ridwan	Pengelola Tata Naskah	100%
23	Kombes Mantiri John Dwi Arya, S.I.K	Kepala Bagian Pengamanan	0
24	Ricky Nafri Habibanda	Analisis Keamanan	100%
25	Yuanna Sisilia	Analisis Keamanan	100%
26	Mundiri	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	104%
27	Mochamad Arafah	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan	100%
28	Parikhin	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%
29	Agusweka Poltak Siregar	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%
30	Razi Fajari Farghani	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%
31	Ika Kurnia Aryani	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	100%
32	Mohammad Arief	Kepala Sub Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	100%
33	Muhamad Nurtamymy	Pengelola BMN	110%
34	Suwarno	Pengelola BMN	100%
35	Achmad Junaedi	Pengelola BMN	127.78%
36	Afrianto Amri	Pengelola BMN	100%
37	Puspita Linda Laras Priska	Pengelola BMN	100%
38	Akbar Anatajaya	Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Laporan Barang Milik Negara	127.83%
39	Rumondang Hasibuan	Pengelola Barang Persediaan	100%
40	Ade Sudrajat	Pengelola Barang Persediaan	100%



$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} \times 100\% = \frac{39}{40} \times 100\% = 97.5\%$$

Pada unit kerja Biro Umum, terdapat 1 pegawai yang belum mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 97.5%.

X. Capaian Kinerja Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Triwulan IV Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	CAPAIAN
1	Sigit Purnomo	Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	102.09%
2	Nanda Adyriansyah	Pranata Komputer Ahli Madya	116.8%
3	Sigit Purnomo	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	124.71%
4	Jefriyanto	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	102.8%
5	Riska Aprian	Pranata Komputer Ahli Muda	100%
6	Sri Haryanti	Pranata Komputer Ahli Muda	100%
7	Widy Hastowahyudi	Pranata Komputer Ahli Muda	118.83%
8	Mazmur Alexander Manik	Pranata Komputer Ahli Muda	108.33%
9	Taufik Gunanda	Pranata Komputer Ahli Pertama	103.13%
10	Tarnoto	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%
11	Nur Rakhman	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%
12	Jeklin Indriani Br Purba	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%
13	Adam Ghuzalee Ramadhan	Pranata Komputer Ahli Pertama	88.4%
14	Muhamad Aussie	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%
15	Muhammad Ridho Ihsan	Pranata Komputer Ahli Pertama	100%
16	Nahar Slamet	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	100%
17	Agung Wisnu Laksono	Pengelola Instalasi TI	100%
18	Muhammad Radhi Zhafari	Pengelola Instalasi TI	100%
19	Indra Pandu Wibowo Purwanto	Pengelola Situs Web	100%
20	Bobi Arianto	Pengelola Situs Web pada Hakim Konstitusi Bapak M. Guntur Hamzah	100%

$$\text{Tingkat Kepatuhan Pengisian} = \frac{\text{Jumlah pegawai yang mengisi}}{\text{Jumlah seluruh pegawai di unit kerja}} = \frac{20}{20} \times 100\% = 100\%$$

Pada unit kerja Pustik, seluruh pegawai telah mengisi capaian kinerja sejak bulan Januari hingga Desember, sehingga tingkat kepatuhan periode Triwulan IV 2022 adalah sebesar 100%.

Demikian kami sampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan,
Tatang Garjito





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor: 519/PW.01/07/2021

14 Juli 2021

Lamp. :-
Perihal : Undangan.

**Kepada Yth.
Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi.
(Daftar nama terlampir)
Di Tempat.**

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dan persiapan pengajuan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal penguatan pelaksanaan manajemen risiko, Inspektorat bermaksud mengadakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko bagi Risk Officer di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/saudara/i untuk menjadi peserta dalam kegiatan tersebut, yang akan dilaksanakan secara virtual pada :

Hari/Tanggal : Rabu – Kamis, 21 s.d 22 Juli 2021

Waktu : Jadwal terlampir

Tempat : Dikantor dan dikediaman masing-masing

Untuk *Link*, *password* meeting dan *virtual background* kegiatan akan kami informasikan lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur
Budi Achmad Djohari

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
2. Panitera Mahkamah Konstitusi
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
4. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
5. Kepala Biro Umum
6. Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
8. Panitera Muda I, II, dan III



Digital Signature
mk-1134221162210713110010

Lamp : Undangan
Nomor : 519/PW.01/07/2021
Tanggal : 14 Juli 2021

Daftar peserta
Bimbingan teknis manajemen risiko bagi *risk officer*
di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021

No.	Nama	Unit Kerja
1	Siska Yuniza	Biro Perencanaan dan Keuangan
2	Khurin'in Kurnia Putri	
3	Elin Asrofah Qibtiah	
4	Allita Prisantama	
5	Agni Rahayu	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
6	Fithatue Amalia Fatla Aini	
7	Rd. Muhamad Billy Almalik	
8	Bianca Prakesi Talamati	
9	Heru Setiawan	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol *
10	Fajar Laksono	
11	Sri Handayani	
12	Budi Wijayanto	
13	Mutia Fria Darsini	
14	Yossi Adriva	
15	R.A Indah Apriyanti	
16	Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit	
17	Hasri Puspita Ainum	
18	Gunawan	
19	Tiara Agustina	
20	Wafda Afina	
21	Olfiziana Tri Hastuti	
22	Rumaisha	
23	Haifa Arief Lubis	
24	Raisa Ayudhita Marsaulina	
25	Syukri Asy'ari	Kepaniteraan
26	Mardian Wibowo	
27	Ria Indriyani	
28	Fransisca	
29	Aditya Yuniarti	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
30	Nuzul Qur'aini Mardiya	



31	Indah Karmadaniah	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
32	Fenny Tri Purnamasari	
33	Oly Viana Agustine	
34	Erna Hasanah	
35	Sharfina Sabila	
36	Dewi Fitriyani	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi *
37	Sigit Purnomo	
38	Jefriyanto	
39	Sri Haryanti	
40	Riska Aprian	
41	Muhammad Radhi Zhafari	
42	Agung Wisnu Laksono	
43	Jeklin Indriani Br Purba	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*
44	Imam Margono	
45	Nanang Subekti	
46	Santhy Kustrihardiani	
47	Bambang Sukmadi	
48	Ardiansyah Salim	
49	Melati Kusuma Wardani	
50	Hadian Taofik Rochman	
51	Angga Putri Gardina	
52	Yahya Amarullah Taufik	
53	Bangkit Panji Anarogo	Biro Umum
54	Dewi Rahmawati	
55	Galuh Tri Astari	
56	Yuanna Sisilia	
57	Ika Kurnia Aryani	Inspektorat **
58	Arshinta Fitriyani	
59	Surya Murni Pangesti	
60	Dhita Cantika Megatania	
61	Dian Dwi Hapsoro	
62	Dwi Poesvitasari	
63	Muhammad Rizki	
64	Wijang Ardi Rahmadi	
65	Amelia Desy Ratna Yuwita	
66	Dillon Davin Zebadiah	
67	M. Fadhel Fahrul Rozi.Z	
68	Raditya Herdana	
69	Andi Siti Chodijah Baso	

*) calon unit kerja WBK/WBBM **) Tim Penilai Internal Pelaksanaan Pembangunan ZI



Jadwal Acara
 Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Bagi *Risk Officer*
 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
 Konstitusi
 Tahun 2021

HARI TANGGAL	JAM	URAIAN	KETERANGAN
Rabu, 21 Juli 2021	08.50	peserta telah bergabung dengan <i>link zoom</i>	Petugas Kelas
	09.00-10.00	Pembukaan	- MC
	10.00-12.00	Overview Manajemen Risiko	- Narasumber
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>	
	13.00-14.00	Overview Manajemen Risiko	- Narasumber
	15.00-15.30	Break	
	15.30-16.30	Tata Cara Penilaian Risiko	- Narasumber
Kamis, 22 Juli 2021	07.50	peserta telah bergabung dengan <i>link zoom</i>	Petugas Kelas
	08.00 -10.00	Tata Cara Penilaian Risiko	- Narasumber
	10.00-10.30	Break	
	10.30-12.00	Identifikasi Risiko Unit Kerja	- Narasumber
	12.00-13.00	<i>ISHOMA</i>	
	13.00-15.00	Analisis Risiko	- Narasumber
	15.00-15.30	Break	
	15.30-16.30	Monitoring Risiko	- Narasumber
23 Juli s.d 30 Juli	Penyempurnaan Profil Risiko Tahun 2021		- Risk Officer & Auditor



Tata Tertib
Bimbingan Teknis Manajemen Risiko Bagi *Risk Officer*
Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021

- 1 Peserta bergabung pada *link zoom* yang telah disediakan selambat-lambatnya 10 menit sebelum acara di mulai;
- 2 Peserta diwajibkan mengisi daftar hadir yang telah disediakan;
- 3 Peserta menggunakan pakaian bebas, rapi dan sopan serta tidak menggunakan kaos (*T-Shirt*) pada saat kegiatan Bimtek berlangsung;
- 4 Peserta disarankan menggunakan Laptop/PC yang terhubung dengan koneksi internet yang stabil dan berada pada lokasi yang tidak terganggu (bising);
- 5 Peserta mengaktifkan kamera video pada Laptop/PC selama mengikuti kegiatan Bimtek;
- 6 Peserta menggunakan *virtual background* yang telah disediakan oleh panitia;
- 7 Peserta diharapkan menonaktifkan suara pada saat pemaparan materi sedang berlangsung;
- 8 Peserta yang akan bertanya dapat menggunakan mode " *Raise Hand*" atau memanfaatkan kolom *chat* yang tersedia.
- 9 Peserta mengumpulkan penyesuaian profil risiko unit kerja selambat - lambatnnya tanggal **2 Agustus 2021**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 246/2900/PW.01/07/2021

Kepada Yth : Kepala Biro / Pusat / Panitera Muda
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK
Dari : Inspektur
Perihal : Pengumpulan Profil Risiko Unit Kerja Tahun 2021
Tanggal : 26 Juli 2021

Dengan hormat, dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada unit kerja, serta menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko bagi *Risk Officer* Tahun 2021 yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 22 Juli 2021, dengan ini kami mohon agar pemilik risiko unit kerja (pimpinan unit kerja) dapat melakukan penyesuaian profil risiko sesuai dengan Target Kinerja pemilik risiko/pimpinan unit Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, dokumen hasil penyesuaian profil risiko Tahun 2021 yang telah selesai dan di tanda tangani pemilik risiko agar dikirimkan ke Inspektorat selambat – lambatnnya tanggal **2 Agustus 2021** .

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera.



Digital Signature
mk-1565649572210726051121



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS 258/2500/PP.00/08/2021

Kepada : Inspektur
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Penyampaian Profil Manajemen Risiko Puslitka Tahun 2021
Tanggal : 02 Agustus 2021

Dengan hormat, sehubungan dengan nota dinas dari Inspektorat Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 246/2900/PW.01/07/2021 tentang pengumpulan profil risiko Unit Kerja Tahun 2021 yang harus disampaikan paling lambat tanggal 2 Agustus 2021, terkait hal tersebut kami sampaikan profil risiko Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan tahun 2021.(terlampir)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-1069234245210802084208

No.	Sasaran Kegiatan	Proses	Kegiatan Risiko	Kategori Risiko	Identifikasi Risiko		Analisis & Evaluasi Risiko							Perubahan Risiko					Pemantauan			Tinjauan									
					U/E*)	Sumber Risiko	Dampak	Pengendalian Eksisting	Efektif	Likelihood		Consequences		Kriteria Risiko	Tingkat Risiko	Pilihan **)	Rencana Tindakan	Tingkat Risiko	Target Waktu pencapaian	PIC	Periode Pemantauan	Realisasi Tingkat Risiko Residu	Pencapaian dan Rencana Tindakan	Status	Faktor Pendorong/ Penghambat	Penyesuaian yang diperlukan					
										Kode	Angka	Kode	Angka														Kriteria Risiko	Tingkat Risiko	Target Waktu pencapaian	PIC	Periode Pemantauan
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1. Penyusunan Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	Kurangnya pemahaman peneliti tentang standar penelitian hukum	Risiko Reputasi	I	Kurangnya sosialisasi internal terkait standar penelitian hukum	Penelitian hukum yang tidak sesuai dengan standar penelitian hukum	Pembelajaran mandiri terkait standar penelitian hukum	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Consequences	Mengadakan pelatihan terkait standar penelitian hukum	2	1	2	Low	1TA	Kabid P3	6 Bulan							
		2. Penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	Waktu penyelesaian kajian perkara lebih lama dari waktu yang diperkirakan	Risiko Reputasi	I	Adanya hambatan dalam proses perolehan berkas perkara	Terlambatnya penyerahan hasil kajian perkara	Pemutakhiran data perolehan berkas perkara melalui aplikasi internal	Efektif	L1	3	C1	2	6	Medium	Reduce Likelihood	Pengalihan perolehan data melalui aplikasi internal yang bisa diakses oleh peneliti	2	2	4	Medium	1TA	Kabid P3	6 Bulan							
		3. Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)	Terbatasnya waktu penyusunan konsep pendapat hukum	Risiko Reputasi	I	Pemberitahuan permintaan konsep pendapat hukum yang tidak terjadwal	Penyusunan konsep pendapat hukum yang kurang maksimal	Penggunaan tambahan waktu kerja (lembur)	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Likelihood	Pemerataan pembagian kerja antar peneliti	2	1	2	Low	1TA	Kabid P3	6 Bulan							
		4. Pemuatan KTI Peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum /media ilmiah atau media ilmiah lainnya	Penolakan KTI Peneliti pada jurnal nasional/internasional serta forum /media ilmiah lainnya	Risiko Reputasi	I	KTI yang belum sesuai standar jurnal atau media ilmiah yang dituju	Tidak tercapainya target kinerja peneliti	Mengikuti pelatihan penulisan ilmiah	Efektif	L1	3	C1	3	9	Medium	Reduce Likelihood	Membuat jadwal pelatihan penulisan KTI secara berkala	2	2	4	Medium	1TA	Kabid P3	6 Bulan							
		5. Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi	Kurangnya referensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MK dan Konstitusi	Risiko Reputasi	I	Keterbatasan anggaran untuk permintaan referensi yang mendasar	Terbatasnya dukungan referensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MK	Penyediaan alokasi anggaran rutin yang dituangkan dalam RAB	Efektif	L1	3	C1	4	12	High	Reduce Consequences	Menjadikan prioritas dalam Rencana alokasi anggaran yang rutin setiap tahun	3	3	9	Medium	1TA	Kabid P3SK	6 Bulan							
2	Terwujudnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan		Tidak tersedianya buku di pasaran	Risiko Reputasi	I	Buku sudah tidak diterbitkan oleh penerbit	Tidak terpenuhinya pemenuhan kebutuhan buku	Mengganti buku dengan subjek yang sama	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Likelihood	Melengkapi referensi buku dengan berbagai subjek sesuai dengan tugas dan fungsi MK, melakukan kerjasama berupa tukar menukar informasi dengan instansi Perputakaan Lain	1	2	2	Low	1TA	Kabid P3SK	3 Bulan							
			Kurangnya referensi ebook lokal yang dimiliki perpustakaan	Risiko Reputasi	I	Belum tersedianya referensi ebook lokal dari penerbit lokal	Pemenuhan kebutuhan referensi tidak terpenuhi untuk koleksi digital lokal	Menyediakan buku lokal cetak dan e-repositori	Efektif	L1	4	C1	2	8	Medium	Reduce Likelihood	Melakukan kerjasama dengan penyedia aplikasi layanan koleksi digital, melakukan pengadaan ebook lokal dan atau pengadaan aplikasi layanan koleksi digital	1	2	2	Low	1TA	Kabid P3SK	6 Bulan							
		6. Pelayanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan	Adanya kunjungan di luar jadwal yang sudah ditentukan	Risiko Reputasi	E	Adanya Pandemi yang dapat meningkatkan resiko penularan virus	Layanan kunjungan kurang optimal	Memberikan layanan secara virtual dengan peralatan dan media yang tersedia	Efektif	L1	4	C1	3	12	High	Reduce Likelihood	Bekerjasama dengan Unit lain dalam pembuatan layanan virtual MK yang berkualitas	2	3	6	Medium	1TA	Kabid P3SK	6 Bulan							
			Belum adanya teknologi pengamanan koleksi perpustakaan yang terintegrasi dengan layanan perpustakaan yang modern	Risiko Reputasi	I	Belum tersedia anggaran	Kurang terjaminnya keamanan koleksi buku dan peralatan baca elektronik/ tab	Membuat TOR dan RAB pengadaan sistem pengamanan perpustakaan	Efektif	L1	4	C1	2	8	Medium	Reduce Likelihood	Mengusulkan ketersediaan anggaran pengadaan pengamanan perpustakaan dan anggaran pemeliharaan secara rutin	1	2	2	Low	1TA	Kabid P3SK	6 Bulan							
			1. Penyetaraan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan	Adanya perubahan kebijakan terkait dengan optimisasi anggaran	Risiko Reputasi	I	Perubahan skala prioritas anggaran sehingga dilakukan pemotongan anggaran	Adanya kegiatan yang tidak terlaksana sesuai dengan Rencana	Melakukan kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran	Efektif	L1	3	C1	2	6	Medium	Reduce Likelihood	Penetapan skala prioritas alokasi anggaran sesuai dengan rencana kegiatan	1	2	2	Low	1TA	Kapustika	3 Bulan						
		2. Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan yang tepat waktu	Terbatasnya waktu penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Risiko Reputasi	I	Kesulitan dalam pengumpulan data laporan karena banyaknya kegiatan menjelang akhir tahun	Penyusunan laporan yang tidak tepat waktu	Melakukan koordinasi dengan unit terkait	Efektif	L1	3	C1	2	6	Medium	Reduce Likelihood	Pengumpulan data komprehensif yang lebih cepat dan tepat waktu	2	2	4	Low	1TA	Kapustika	3 Bulan							
		3. Tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan yang tepat waktu (PKT, PK, Renmin)	Terbatasnya waktu penyusunan dokumen kinerja PNS	Risiko Reputasi	I	Memupuknya pekerjaan di luar topik yang harus diselesaikan	Penyusunan dokumen kinerja PNS yang tidak tepat waktu	Menetapkan jadwal pengumpulan dokumen kinerja PNS	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Consequences	Melakukan koordinasi pengumpulan dokumen kinerja PNS	2	1	2	Low	1TA	Kapustika	6 Bulan							
		4. Pengalihan keuangan yang bebas dari temuan material	Penyeragaman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi	Risiko Anggaran	E	Faktor kepentingan dari Penyedia Barang	Adanya temuan material dalam pengalihan keuangan	Monitoring proses pengalihan oleh Komandan Pengawas	Efektif	L1	3	C1	3	9	Medium	Reduce Likelihood	Melakukan pemeriksaan barang yang lebih detail sesuai spesifikasi	1	3	3	Medium	1TA	Kapustika	1 Tahun							
		5. PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	Tidak tercapainya SKP Bulanan dan Tahapan Kegiatan	Risiko Reputasi	I	Kurangnya kesadaran PNS untuk mengisi SKP Bulanan dan Tahapan Kegiatan	PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP tidak baik	Sosialisasi pengisian SKP	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Likelihood	Pemberian punishment bagi pegawai yang tidak mengisi SKP Bulanan dan Tahapan Kegiatan	1	2	2	Low	1TA	Kapustika	6 Bulan							
		6. Kepuasan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan terhadap pengisian aplikasi E-kinerja	Kurangnya pemahaman PNS untuk mengisi aplikasi e-kinerja	Risiko Reputasi	I	Kurangnya kesadaran PNS untuk mengisi aplikasi e-kinerja	Terjadi kesalahan dalam pengisian aplikasi e-kinerja	Sosialisasi pengisian e-kinerja	Efektif	L1	3	C1	2	6	Medium	Reduce Likelihood	Mengingatkan PNS untuk mengisi e-kinerja	1	2	2	Low	1TA	Kapustika	3 Bulan							
		7. Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perputakaan	Terdapat pegawai yang meninggalkan Surat Peringatan (SP) terkait tingkat kehadiran Perputakaan	Risiko Reputasi	I	Kurangnya disiplin pegawai terkait kehadiran	Penurunan presentase kehadiran pegawai Puslitka	Pemberian teguran oleh atasan langsung kepada pegawai terkait	Efektif	L1	2	C1	2	4	Medium	Reduce Likelihood	Melakukan pengawasan intensif oleh Atasan	1	2	2	Low	1TA	Kapustika	3 Bulan							
			Perubahan sistem kerja pegawai menjadi sistem WFH dan WFO	Risiko Reputasi	I	Pemberlakuan kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat	Kurangnya adaptasi pegawai dalam melakukan presensi menggunakan teknologi terkini (HP/Laptop)	Pembentahan rutin kepada pegawai untuk melakukan presensi online	Efektif	L1	3	C1	2	6	Medium	Reduce Likelihood	Melakukan pengawasan presensi online pegawai	1	2	2	Low	1TA	Kapustika	3 Bulan							
		8. Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Kearsipan	Terdapat pegawai yang tidak membuka SKD	Risiko Reputasi	I	Kurangnya kesadaran pegawai untuk membuka SKD	Ketidaktahuan informasi yang dapat diperoleh dari SKD	Pembentahan rutin kepada pegawai untuk membuka SKD	Efektif	L1	3	C1	3	9	Medium	Reduce Likelihood	Melakukan pengawasan penggunaan aplikasi SKD	1	3	3	Medium	1TA	Kapustika	3 Bulan							



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 279/2900/PW.01/08/2021

Kepada Yth. : Kepala Biro / Kepala Pusat
Dari : Inspektur
Perihal : Permohonan Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
Tanggal : 13 Agustus 2021
Area RB : Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka mendukung dan mengawal pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan manajemen risiko, Inspektorat bermaksud akan menyelenggarakan kegiatan sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko (*Certified Risk Manajemen Officer*) dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Pelatihan Manajemen Risiko	22 s.d 24 September 2021	Daring
2.	Ujian Sertifikasi	30 September 2021	Tatap muka

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan unit kerja agar dapat menunjuk 1 (satu) orang pegawai yang telah ditunjuk sebagai *risk officer* pada unit kerjanya sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No.165 Tahun 2021 tentang *Risk Officer* Manajemen Risiko Pada Unit Kerja Tahun 2021, untuk mengikuti kegiatan tersebut diatas. Nama pegawai yang ditugaskan kami mohon dapat di informasikan ke Inspektorat selambat – lambatnya tanggal 26 Agustus 2021.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak/ibu, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur
Budi Achmad Djohari

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
2. Panitera Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk763545442210813044933



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 165 TAHUN 2021

TENTANG *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu menetapkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan risiko di setiap unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang *Risk Officer* pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012



- tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 52.1 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG *RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021.**
- KESATU : Menetapkan *Risk Officer* Manajemen Risiko pada unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : *Risk Officer* sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas membantu pemilik risiko untuk mengelola risiko pada unit kerja, yaitu dengan melaksanakan:
- a. Identifikasi dan menilai risiko;
 - b. Analisis risiko;
 - c. Evaluasi risiko;
 - d. Monitoring risiko.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 April 2021
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH



**Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**
Nomor : NOMOR 165 TAHUN 2021

Tanggal : 30 April 2021

***RISK OFFICER* MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT KERJA
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021**

No.	Unit Kerja	Nama
1.	Biro Perencanaan dan Keuangan	Siska Yuniza
		Khurin'in Kurnia Putri
		Elin Asrofah Qibtiah
		Allita Prisantama
2.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Agni Rahayu
		Fithatue Amalia Fatla Aini
		Rd. Muhamad Billy Almalik
		Bianca Prakesi Talamati
3.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	Tiara Agustina
		Wafda Afina
		Olfziana Tri Hastuti
		Rumaisha
4.	Kepaniteraan	Syukri Asy'ari
		Mardian Wibowo
		Ria Indriyani
		Fransisca
5.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Aditya Yuniarti
		Nuzul Qur'aini Mardiya
		Indah Karmadaniah
		Fenny Tri Purnamasari
6.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Oly Viana Agustine
		Erna Hasanah
		Sharfina Sabila
		Dewi Fitriyani
7.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Riska Aprian
		Muhammad Radhi Zhafari
		Agung Wisnu Laksono
		Jeklin Indriani Br Purba
8.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Hadian Taofik Rochman
		Angga Putri Gardina
		Yahya Amarullah Taufik
		Bangkit Panji Anarogo
9.	Biro Umum	Dewi Rahmawati
		Galuh Tri Astari
		Yuanna Sisilia
		Ika Kurnia Aryani
10.	Inspektorat	Arshinta Fitriyani



	Dwi Poesvitasari
	Dillon Davin Zebadiah
	Surya Murni Pangesti

**SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Area Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

NOTA DINAS

Nomor : 289/2500/PP.00/08/2021

Kepada Yth : Inspektur
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Usulan Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko unit
Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan
Tanggal : 19 Agustus 2021

Dengan hormat, menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Nomor: 279/2900/PW.01/08/2021, tanggal 13 Agustus 2021, perihal Permohonan Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko, bersama ini kami sampaikan usulan peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko di unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yaitu:

No.	Nama/NIP	Jabatan
1.	Erna Hasanah, S.A.P., M.A. NIP. 19821214 200712 2 002	Pengadministrasi Umum

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepaka Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Digital Signature
mk-1895511095210819025830



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 310/2900/PW.01/09/2021

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Laporan persiapan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Keahlian
Manajemen Risiko
Tanggal : 09 September 2021
Area RB : Pembangunan Zona Integritas.

Dengan hormat, dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko (*Certified Risk Manajemen Officer*) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Rangkaian kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko terbagi menjadi dua tahapan yaitu pelatihan manajemen risiko dan ujian sertifikasi keahlian;
2. Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko berjumlah 21 orang yang terdiri atas Pejabat Fungsional Auditor, pegawai di Inspektorat serta perwakilan *Risk Officer* pada unit kerja;
3. Jadwal pelaksanaan pelatihan sertifikasi keahlian manajemen risiko yang semula akan dilaksanakan secara virtual pada tanggal 15-16 September 2021 di tunda pelaksanaannya menjadi tanggal **22-24 September 2021**, karena bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan JOIC di Bandung, dimana sebagian peserta menjadi Tim Kerja dalam kegiatan tersebut;
4. Penyelenggara pelatihan sertifikasi keahlian manajemen risiko adalah PT. Risk Advisory & Performance (RAP) *Consulting* yang terpilih melalui proses pengadaan oleh ULP Mahkamah Konstitusi, materi dan narasumber pelatihan terlampir;
5. Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko akan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LPSMR) secara tatap muka pada tanggal **30 September 2021**, bertempat di Aula Gedung Mahkamah Konstitusi;
6. Peserta yang berhasil lulus ujian sertifikasi akan mendapatkan gelar keahlian *Certified Risk Manajemen Officer (CRMO)*;



7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut kami mohon untuk dapat memberikan ijin melakukan perjalanan dinas bagi peserta dari Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada saat pelaksanaan ujian sertifikasi;
8. Mohon perkenan Bapak Sekjen untuk dapat memberikan seminar kit kepada para peserta kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko tersebut;

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan dan arahan Bapak untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut, apabila Bapak tidak berpendapat lain akan segera kami tindak lanjuti.

Atas kebijaksanaan dan perkenan Bapak Sekjen, diucapkan terima kasih .

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



Lamp : Nota Dinas
 Nomor : 310/2900/PW.01/09/2021
 Tanggal : 09 September 2021

Jadwal Kegiatan Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

NO	HARI /TANGGAL	JAM	MATERI	PENGAJAR
1	Rabu 22 September 2021	08.00-08.30	Pembukaan	Dr. Ir. Rudolf Lumbantobing, MM,CRMO
		08.30 - 10.00	Business Quantitative	
		10.00 - 10.15	Break	
		10.15 - 12.00	Business Quantitative	
		12.00 - 13.00	ISHOMA	
		13.00 - 15.00	Business Quantitative	
		15.00 - 15.30	Break	
		15.30 - Selesai	Briefing Uji Sertifikasi LSPMR	LSPMR
2	Kamis 23 September 2021	09.00 - 10.00	Basic Concept Risk Management	Ricardo Pardede, MH,CRMP,CIPMP,CISCP,BCMCP, QIA, CRGP
		10.00 - 10.15	Break	
		10.15 - 12.00	Introduction Enterprise Risk Management	
		12.00 - 13.00	ISHOMA	
		13.00 - 15.00	Melakukan Identifikasi Risiko	
		15.00 - 15.30	Break	
		15.30 - 18.00	Melakukan Pengukuran Risiko	
3	Jumat 24 September 2021	09.00 - 10.00	Melakukan Pengukuran Risiko	Ricardo Pardede, MH,CRMP,CIPMP,CISCP,BCMCP, QIA, CRGP
		10.00 - 10.15	Break	
		10.15 - 11.30	Melakukan Pemetaan Risiko	
		11.30 - 13.00	ISHOMA	
		13.00 - 15.00	Mengembangkan Respon/Perlakuan Risiko	
		15.00 - 15.30	Break	
		15.30 - 17.00	Monitoring dan Pelaporan Risiko	
		17.00 - 18.00	Latihan Soal / Simulasi Ujian	
4	Kamis 30 September 2021	08.00 s.d selesai	Ujian Sertifikasi Keahlian	LSPMR



Daftar Peserta Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko
(Certified Risk Management Officer /CRMO)
 Di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
 Mahkamah Konstitusi

No.	Nama	Unit Kerja
1.	Arshinta Fitridiyani	Inspektorat
2.	Surya Murni Pangesti	
3.	Dhita Cantika Megatania	
4.	Dian Dwi Hapsoro	
5.	Dwi Poesvitasari	
6.	Muhammad Rizki	
7.	Wijang Ardi Rahmadi	
8.	Amelia Desy Ratna Yuwita	
9.	Dillon Davin Zebadiah	
10.	M. Fadhel Fahrul Rozi.Z	
11.	Raditya Herdana	
12.	Andi Siti Chodijah Baso	
13.	Allita Prisantama	Biro Perencanaan dan Keuangan
14.	Yuana Sisilia	Biro Umum
15.	Erna Hasanah	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
16.	Aditya Yuniarti	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17.	Tiara Agustina	Biro Humas dan Protokol
18.	Fithatue Amalia Fatla Aini	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
19.	Hadian Taofik Rochman	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
20.	Jeklin Indriani Br Purba	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
21.	Mardian Wibowo	Kepaniteraan



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/17/RB.01/2021

13 Agustus 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 4 berkas

Hal : **Kick off meeting Pelaksanaan Evaluasi
SAKIP, RB, dan ZI tahun 2021**

Yth.

1. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Lembaga Negara;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian;
3. Sekretaris Utama/Sekretaris Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;
5. Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;
6. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;
7. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

di

Tempat

Dalam rangka untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) akan dilakukan evaluasi pada seluruh instansi pemerintah. Untuk tahun 2021 evaluasi dilaksanakan secara *desk* evaluasi dan pendalaman akan dilakukan secara virtual. Untuk itu Kementerian PANRB akan melaksanakan *entry meeting* evaluasi bagi seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bersama pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021

Waktu : 09.00 – 11.45 WIB

Pelaksanaan : *Zoom Webinar ID: 853 9588 4471, Passcode: Kick-off*, dan *Live Youtube : rbkunwas*

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, mohon Saudara dapat hadir tepat waktu dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. *User ID* peserta harap menggunakan format sebagai berikut: **(Nama Instansi_ Nama Unit Kerja_ Nama Peserta)**. Sebagai contoh “Kemenkeu_Itjen_Adi” atau “Kab.Malang_Sekda_Mira”. Panitia hanya akan melakukan *approval* kepada peserta *meeting* yang memenuhi ketentuan di atas;
2. Diharapkan kerjasama seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan dengan mematikan *speaker/mute audio* dan menampilkan video diri;
3. Setiap peserta dipersilahkan untuk menggunakan *background zoom* yang menampilkan identitas instansi masing-masing;
4. Peserta diharapkan dapat bergabung pada *zoom meeting* 1 jam sebelum acara dimulai;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210812PQRV



Balai
Sertifikasi
Elektronik

5. Karena keterbatasan kuota *zoom*, untuk Kementerian dan Lembaga akan diberikan 2 akses akun (1 akun untuk inspektorat dan 1 akun untuk sekretariat) dan Pemerintah Daerah akan diberikan akses 1 akun.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdri.Riri (081314640641); Sdri. Nila (085747965895) atau Sdr. Khoris (081363169593). Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ERWAN AGUS PURWANTO
Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur,
dan Pengawasan
NIP. 196808021998031001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 210812PQRV



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Lampiran 1.

Rundown acara

**Kick Off Meeting Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI
Rabu, 18 Agustus 2021**

Waktu	Kegiatan	Keterangan
07.30 – 09.00 WIB	1. Registrasi dan Persiapan acara 2. Peserta bergabung melalui link <i>zoom</i> 1 jam sebelum acara dimulai	-
09.00 – 09.10 WIB	1. Pembukaan Acara oleh MC 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya	Dibuka oleh MC
09.10 – 09.40 WIB	Penyampaian Arahan dan peluncuran <i>entry meeting</i> evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2021	Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
09.40 – 10.40 WIB	Arahan pelaksanaan evaluasi SAKIP, RB, dan ZI 2021	Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III
10.40 – 11.40 WIB	Penyampaian Mekanisme Survey eksternal RB dan ZI 2021	Tim SHPRBZI Deputi RBKUNWAS
11.40 – 11.45 WIB	Penutupan Acara	Ditutup oleh MC

Lampiran 2.

**DAFTAR UNDANGAN KEMENTERIAN, LEMBAGA NEGARA, LEMBAGA PEMERINTAH
NON KEMENTERIAN, TNI DAN POLRI**

Nama Instansi
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Pertahanan
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kejaksaan Agung
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Komisi Yudisial
Tentara Nasional Indonesia
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Kementerian Sekretariat Negara
Sekretariat Kabinet
Sekretariat Jenderal MPR
Sekretariat Jenderal DPD
Sekretariat Jenderal DPR
Lembaga Sandi Negara/Badan Siber dan Sandi Negara
Badan Intelijen Negara
Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Lembaga Administrasi Negara
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Lembaga Ketahanan Nasional
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Komisi Pemberantasan Korupsi
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Televisi Republik Indonesia
Radio Republik Indonesia
Ombudsman Republik Indonesia
Komisi Aparatur Sipil Negara
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Kementerian Keuangan

Kementerian Perindustrian
Kementerian Perdagangan
Kementerian Pertanian
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian Ketenagakerjaan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Badan Usaha Milik Negara
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pusat Statistik
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Badan Standardisasi Nasional
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Badan Informasi Geospasial
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kementerian Kesehatan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Sosial
Kementerian Agama
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Badan Nasional Pencarian Pertolongan
Perpustakaan Nasional
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Lampiran 3.

DAFTAR UNDANGAN PEMERINTAH PROVINSI

Nama Instansi Pemerintah
Pemerintah Provinsi Aceh
Pemerintah Provinsi Bali
Pemerintah Provinsi Banten
Pemerintah Provinsi Bengkulu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Jambi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Provinsi Lampung
Pemerintah Provinsi Maluku
Pemerintah Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Provinsi Papua
Pemerintah Provinsi Papua Barat
Pemerintah Provinsi Riau
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Lampiran 4.

DAFTAR UNDANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH KOTA

Nama Instansi Pemerintah	Provinsi
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Provinsi Aceh
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya	
Pemerintah Kabupaten Aceh Besar	
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	
Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan	
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil	
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang	
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah	
Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur	
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara	
Pemerintah Kabupaten Bener Meriah	
Pemerintah Kabupaten Bireuen	
Pemerintah Kabupaten Gayo Lues	
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	
Pemerintah Kabupaten Pidie	
Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya	
Pemerintah Kabupaten Simeulue	
Pemerintah Kota Banda Aceh	
Pemerintah Kota Langsa	
Pemerintah Kota Lhokseumawe	
Pemerintah Kota Sabang	
Pemerintah Kota Subulussalam	Provinsi Bali
Pemerintah Kabupaten Badung	
Pemerintah Kabupaten Bangli	
Pemerintah Kabupaten Buleleng	
Pemerintah Kabupaten Gianyar	
Pemerintah Kabupaten Jembrana	
Pemerintah Kabupaten Karangasem	
Pemerintah Kabupaten Klungkung	
Pemerintah Kabupaten Tabanan	
Pemerintah Kota Denpasar	
Pemerintah Kabupaten Lebak	Provinsi Banten
Pemerintah Kabupaten Pandeglang	
Pemerintah Kabupaten Serang	
Pemerintah Kabupaten Tangerang	
Pemerintah Kota Cilegon	
Pemerintah Kota Serang	
Pemerintah Kota Tangerang	
Pemerintah Kota Tangerang Selatan	
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan	Provinsi Bengkulu
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah	
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara	
Pemerintah Kabupaten Kaur	

Pemerintah Kabupaten Kepahiang	
Pemerintah Kabupaten Lebong	
Pemerintah Kabupaten Mukomuko	
Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong	
Pemerintah Kabupaten Seluma	
Pemerintah Kota Bengkulu	
Pemerintah Kabupaten Bantul	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul	
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo	
Pemerintah Kabupaten Sleman	
Pemerintah Kota Yogyakarta	
Pemerintah Kabupaten Boalemo	Provinsi Gorontalo
Pemerintah Kabupaten Bone Bolango	
Pemerintah Kabupaten Gorontalo	
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara	
Pemerintah Kabupaten Pohuwato	
Pemerintah Kota Gorontalo	
Pemerintah Kabupaten Batang Hari	Provinsi Jambi
Pemerintah Kabupaten Bungo	
Pemerintah Kabupaten Kerinci	
Pemerintah Kabupaten Merangin	
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	
Pemerintah Kabupaten Sarolangun	
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
Pemerintah Kabupaten Tebo	
Pemerintah Kota Jambi	
Pemerintah Kota Sungai Penuh	Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Kabupaten Bandung	
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat	
Pemerintah Kabupaten Bekasi	
Pemerintah Kabupaten Bogor	
Pemerintah Kabupaten Ciamis	
Pemerintah Kabupaten Cianjur	
Pemerintah Kabupaten Cirebon	
Pemerintah Kabupaten Garut	
Pemerintah Kabupaten Indramayu	
Pemerintah Kabupaten Karawang	
Pemerintah Kabupaten Kuningan	
Pemerintah Kabupaten Majalengka	
Pemerintah Kabupaten Pangandaran	
Pemerintah Kabupaten Purwakarta	
Pemerintah Kabupaten Subang	
Pemerintah Kabupaten Sukabumi	
Pemerintah Kabupaten Sumedang	
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya	
Pemerintah Kota Bandung	
Pemerintah Kota Banjar	
Pemerintah Kota Bekasi	
Pemerintah Kota Bogor	

Pemerintah Kota Cimahi	Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Kota Cirebon	
Pemerintah Kota Depok	
Pemerintah Kota Sukabumi	
Pemerintah Kota Tasikmalaya	
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara	
Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Pemerintah Kabupaten Batang	
Pemerintah Kabupaten Blora	
Pemerintah Kabupaten Boyolali	
Pemerintah Kabupaten Brebes	
Pemerintah Kabupaten Cilacap	
Pemerintah Kabupaten Demak	
Pemerintah Kabupaten Grobogan	
Pemerintah Kabupaten Jepara	
Pemerintah Kabupaten Karanganyar	
Pemerintah Kabupaten Kebumen	
Pemerintah Kabupaten Kendal	
Pemerintah Kabupaten Klaten	
Pemerintah Kabupaten Kudus	
Pemerintah Kabupaten Magelang	
Pemerintah Kabupaten Pati	
Pemerintah Kabupaten Pekalongan	
Pemerintah Kabupaten Pemalang	
Pemerintah Kabupaten Purbalingga	
Pemerintah Kabupaten Purworejo	
Pemerintah Kabupaten Rembang	
Pemerintah Kabupaten Semarang	
Pemerintah Kabupaten Sragen	
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	
Pemerintah Kabupaten Tegal	
Pemerintah Kabupaten Temanggung	
Pemerintah Kabupaten Wonogiri	
Pemerintah Kabupaten Wonosobo	
Pemerintah Kota Magelang	
Pemerintah Kota Pekalongan	
Pemerintah Kota Salatiga	
Pemerintah Kota Semarang	
Pemerintah Kota Surakarta	
Pemerintah Kota Tegal	
Pemerintah Kabupaten Bangkalan	Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	
Pemerintah Kabupaten Blitar	
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	
Pemerintah Kabupaten Bondowoso	
Pemerintah Kabupaten Gresik	
Pemerintah Kabupaten Jember	
Pemerintah Kabupaten Jombang	
Pemerintah Kabupaten Kediri	
Pemerintah Kabupaten Lamongan	

Pemerintah Kabupaten Lumajang		
Pemerintah Kabupaten Madiun		
Pemerintah Kabupaten Magetan		
Pemerintah Kabupaten Malang		
Pemerintah Kabupaten Mojokerto		
Pemerintah Kabupaten Nganjuk		
Pemerintah Kabupaten Ngawi		
Pemerintah Kabupaten Pacitan		
Pemerintah Kabupaten Pamekasan		
Pemerintah Kabupaten Pasuruan		
Pemerintah Kabupaten Ponorogo		
Pemerintah Kabupaten Probolinggo		
Pemerintah Kabupaten Sampang		
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		
Pemerintah Kabupaten Situbondo		
Pemerintah Kabupaten Sumenep		
Pemerintah Kabupaten Trenggalek		
Pemerintah Kabupaten Tuban		
Pemerintah Kabupaten Tulungagung		
Pemerintah Kota Batu		
Pemerintah Kota Blitar		
Pemerintah Kota Kediri		
Pemerintah Kota Madiun		
Pemerintah Kota Malang		
Pemerintah Kota Mojokerto		
Pemerintah Kota Pasuruan		
Pemerintah Kota Probolinggo		
Pemerintah Kota Surabaya		
Pemerintah Kabupaten Bengkayang		Provinsi Kalimantan Barat
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu		
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara		
Pemerintah Kabupaten Ketapang		
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya		
Pemerintah Kabupaten Landak		
Pemerintah Kabupaten Melawi		
Pemerintah Kabupaten Mempawah		
Pemerintah Kabupaten Sambas		
Pemerintah Kabupaten Sanggau		
Pemerintah Kabupaten Sekadau		
Pemerintah Kabupaten Sintang		
Pemerintah Kota Pontianak		
Pemerintah Kota Singkawang		
Pemerintah Kabupaten Balangan	Provinsi Kalimantan Selatan	
Pemerintah Kabupaten Banjar		
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala		
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah		
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara		
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kotabaru		
Pemerintah Kabupaten Tabalong		

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut	
Pemerintah Kabupaten Tapin	
Pemerintah Kota Banjarbaru	
Pemerintah Kota Banjarmasin	
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan	Provinsi Kalimantan Tengah
Pemerintah Kabupaten Barito Timur	
Pemerintah Kabupaten Barito Utara	
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas	
Pemerintah Kabupaten Kapuas	
Pemerintah Kabupaten Katingan	
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat	
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur	
Pemerintah Kabupaten Lamandau	
Pemerintah Kabupaten Murung Raya	
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau	
Pemerintah Kabupaten Seruyan	
Pemerintah Kabupaten Sukamara	
Pemerintah Kota Palangkaraya	
Pemerintah Kabupaten Berau	
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	
Pemerintah Kabupaten Paser	
Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	
Pemerintah Kota Balikpapan	
Pemerintah Kota Bontang	
Pemerintah Kota Samarinda	
Pemerintah Kabupaten Bulungan	Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Kabupaten Malinau	
Pemerintah Kabupaten Nunukan	
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung	
Pemerintah Kota Tarakan	
Pemerintah Kabupaten Bangka	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat	
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan	
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah	
Pemerintah Kabupaten Belitung	
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	
Pemerintah Kota Pangkal Pinang	
Pemerintah Kabupaten Bintan	Provinsi Kepulauan Riau
Pemerintah Kabupaten Karimun	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	
Pemerintah Kabupaten Lingga	
Pemerintah Kabupaten Natuna	
Pemerintah Kota Batam	
Pemerintah Kota Tanjungpinang	
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Provinsi Lampung
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan	

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah	
Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	
Pemerintah Kabupaten Lampung Utara	
Pemerintah Kabupaten Mesuji	
Pemerintah Kabupaten Pesawaran	
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	
Pemerintah Kabupaten Pringsewu	
Pemerintah Kabupaten Tanggamus	
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang	
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	
Pemerintah Kabupaten Way Kanan	
Pemerintah Kota Bandar Lampung	
Pemerintah Kota Metro	
Pemerintah Kabupaten Buru	Provinsi Maluku
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru	
Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya	
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar	
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat	
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur	
Pemerintah Kota Ambon	
Pemerintah Kota Tual	
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Provinsi Maluku Utara
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan	
Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula	
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai	
Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu	
Pemerintah Kota Ternate	
Pemerintah Kota Tidore kepulauan	
Pemerintah Kabupaten Bima	Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pemerintah Kabupaten Dompu	
Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah	
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur	
Pemerintah Kabupaten Lombok Utara	
Pemerintah Kabupaten Sumbawa	
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	
Pemerintah Kota Bima	
Pemerintah Kota Mataram	
Pemerintah Kabupaten Alor	Provinsi Nusa Tenggara Timur
Pemerintah Kabupaten Belu	
Pemerintah Kabupaten Ende	
Pemerintah Kabupaten Flores Timur	
Pemerintah Kabupaten Kupang	
Pemerintah Kabupaten Lembata	

Pemerintah Kabupaten Malaka	
Pemerintah Kabupaten Manggarai	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	
Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	
Pemerintah Kabupaten Nagekeo	
Pemerintah Kabupaten Ngada	
Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	
Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	
Pemerintah Kabupaten Sikka	
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	
Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	
Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	
Pemerintah Kota Kupang	Provinsi Papua
Pemerintah Kabupaten Asmat	
Pemerintah Kabupaten Biak Numfor	
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel	
Pemerintah Kabupaten Deiyai	
Pemerintah Kabupaten Dogiyai	
Pemerintah Kabupaten Intan Jaya	
Pemerintah Kabupaten Jayapura	
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya	
Pemerintah Kabupaten Keerom	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen	
Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya	
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya	
Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah	
Pemerintah Kabupaten Mappi	
Pemerintah Kabupaten Merauke	
Pemerintah Kabupaten Mimika	
Pemerintah Kabupaten Nabire	
Pemerintah Kabupaten Nduga	
Pemerintah Kabupaten Paniai	
Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang	
Pemerintah Kabupaten Puncak	
Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya	
Pemerintah Kabupaten Sarmi	
Pemerintah Kabupaten Supiori	
Pemerintah Kabupaten Tolikara	
Pemerintah Kabupaten Waropen	
Pemerintah Kabupaten Yahukimo	
Pemerintah Kabupaten Yalimo	
Pemerintah Kota Jayapura	Provinsi Papua Barat
Pemerintah Kabupaten Fakfak	
Pemerintah Kabupaten Kaimana	
Pemerintah Kabupaten Manokwari	
Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan	
Pemerintah Kabupaten Maybrat	

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak		
Pemerintah Kabupaten Raja Ampat		
Pemerintah Kabupaten Sorong		
Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan		
Pemerintah Kabupaten Tambrauw		
Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni		
Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama		
Pemerintah Kota Sorong		
Pemerintah Kabupaten Bengkalis	Provinsi Riau	
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir		
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu		
Pemerintah Kabupaten Kampar		
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti		
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi		
Pemerintah Kabupaten Pelalawan		
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir		
Pemerintah Kabupaten Rokan hulu		
Pemerintah Kabupaten Siak		
Pemerintah Kota Dumai		
Pemerintah Kota Pekanbaru		
Pemerintah Kabupaten Majene		Provinsi Sulawesi Barat
Pemerintah Kabupaten Mamasa		
Pemerintah Kabupaten Mamuju		
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah		
Pemerintah Kabupaten Pasangkayu		
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar		
Pemerintah Kabupaten Bantaeng	Provinsi Sulawesi Selatan	
Pemerintah Kabupaten Barru		
Pemerintah Kabupaten Bone		
Pemerintah Kabupaten Bulukumba		
Pemerintah Kabupaten Enrekang		
Pemerintah Kabupaten Gowa		
Pemerintah Kabupaten Jeneponto		
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar		
Pemerintah Kabupaten Luwu		
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur		
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara		
Pemerintah Kabupaten Maros		
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan		
Pemerintah Kabupaten Pinrang		
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang		
Pemerintah Kabupaten Sinjai		
Pemerintah Kabupaten Soppeng		
Pemerintah Kabupaten Takalar		
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja		
Pemerintah Kabupaten Toraja Utara		
Pemerintah Kabupaten Wajo		
Pemerintah Kota Makassar		
Pemerintah Kota Palopo		
Pemerintah Kota Pare-Pare		

Pemerintah Kabupaten Banggai	Provinsi Sulawesi Tengah
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan	
Pemerintah Kabupaten Banggai Laut	
Pemerintah Kabupaten Buol	
Pemerintah Kabupaten Donggala	
Pemerintah Kabupaten Morowali	
Pemerintah Kabupaten Morowali Utara	
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	
Pemerintah Kabupaten Poso	
Pemerintah Kabupaten Sigi	
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-una	
Pemerintah Kabupaten Tolitoli	
Pemerintah Kota Palu	
Pemerintah Kabupaten Bombana	Provinsi Sulawesi Tenggara
Pemerintah Kabupaten Buton	
Pemerintah Kabupaten Buton Selatan	
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah	
Pemerintah Kabupaten Buton Utara	
Pemerintah Kabupaten Kolaka	
Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur	
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara	
Pemerintah Kabupaten Konawe	
Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan	
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan	
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	
Pemerintah Kabupaten Muna	
Pemerintah Kabupaten Muna Barat	
Pemerintah Kabupaten Wakatobi	
Pemerintah Kota Bau-Bau	
Pemerintah Kota Kendari	
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow	Provinsi Sulawesi Utara
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud	
Pemerintah Kabupaten Minahasa	
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan	
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara	
Pemerintah Kota Bitung	
Pemerintah Kota Kotamobagu	
Pemerintah Kota Manado	
Pemerintah Kota Tomohon	
Pemerintah Kabupaten Agam	Provinsi Sumatera Barat
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai	
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Pemerintah Kota	

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	
Pemerintah Kabupaten Pasaman	
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	
Pemerintah Kabupaten Sijunjung	
Pemerintah Kabupaten Solok	
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	
Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	
Pemerintah Kota Bukittinggi	
Pemerintah Kota Padang	
Pemerintah Kota Padang Panjang	
Pemerintah Kota Pariaman	
Pemerintah Kota Payakumbuh	
Pemerintah Kota Sawahlunto	
Pemerintah Kota Solok	
Pemerintah Kabupaten Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang	
Pemerintah Kabupaten Lahat	
Pemerintah Kabupaten Muara Enim	
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin	
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas	
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara	
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir	
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir	
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	
Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	
Pemerintah Kota Lubuklinggau	
Pemerintah Kota Pagar Alam	
Pemerintah Kota Palembang	
Pemerintah Kota Prabumulih	
Pemerintah Kabupaten Asahan	Provinsi Sumatera Utara
Pemerintah Kabupaten Batubara	
Pemerintah Kabupaten Dairi	
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang	
Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan	
Pemerintah Kabupaten Karo	
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu	
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara	
Pemerintah Kabupaten Langkat	
Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal	
Pemerintah Kabupaten Nias	
Pemerintah Kabupaten Nias Barat	
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan	
Pemerintah Kabupaten Nias Utara	
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas	
Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara	
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	

Pemerintah Kabupaten Samosir	
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	
Pemerintah Kabupaten Simalungun	
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara	
Pemerintah Kabupaten Toba Samosir	
Pemerintah Kota Binjai	
Pemerintah Kota Gunungsitoli	
Pemerintah Kota Medan	
Pemerintah Kota Padangsidimpuan	
Pemerintah Kota Pematang Siantar	
Pemerintah Kota Sibolga	
Pemerintah Kota Tanjung Balai	
Pemerintah Kota Tebing Tinggi	



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor: 758/2200/OT.03/08/2021

RB Area Pelayanan Publik

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
Perihal : Penyampaian Surat Nomor B/17/RB.01/201 Tanggal 13 Agustus 2021 Hal *Kick off meeting* Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2021 dari Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB
Tanggal : 16 Agustus 2021

Sehubungan dengan adanya Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Nomor B/17/RB.01/201 Tanggal 13 Agustus 2021 Hal *Kick off meeting* Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI Tahun 2021 (terlampir), bersama dengan nota dinas ini, dengan hormat kami sampaikan surat dimaksud yang substansinya adalah informasi mengenai pelaksanaan *entry meeting* evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai berikut:

1. Metode Evaluasi dan Waktu Pelaksanaan *Kick Off Meeting*:
 - a. Metode evaluasi akan dilaksanakan melalui *desk evaluation* dan pendalaman akan dilakukan secara virtual;
 - b. Waktu pelaksanaan secara bersama – sama:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu : 09.00 – 11.45 WIB
Pelaksanaan : *Zoom Webinar ID: 853 9588 4471, Passcode: Kick-off*, dan *Live Youtube: rbkunwas*
2. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mengikuti *Kick Off Meeting* melalui *Zoom Meeting*:
 - a. Peserta diharapkan untuk hadir tepat waktu;
 - b. *User ID* peserta harap menggunakan format sebagai berikut: **(Nama Instansi_Nama Unit Kerja_Nama Peserta)**. Sebagai contoh “Kemenkeu_Itjen_Adi”. Panitia hanya akan melakukan approval kepada peserta meeting yang memenuhi ketentuan tersebut;
 - c. Diharapkan kerjasama seluruh peserta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran kegiatan dengan mematikan *speaker/mute audio* dan menampilkan video diri;
 - d. Setiap peserta dipersilakan untuk menggunakan *background zoom* yang menampilkan identitas instansi masing – masing;
 - e. Peserta diharapkan dapat bergabung pada *zoom meeting* 1 (satu) jam sebelum acara dimulai;
 - f. Karena keterbatasan kuota *zoom*, untuk Kementerian dan Lembaga akan diberikan **2 (dua) akses akun (1/satu akun untuk Inspektorat dan 1/satu akun untuk sekretariat)**.



3. Untuk informasi lebih lanjut MK dapat menghubungi narahubung Kementerian PAN RB, yaitu:
 - a. Sdri. Nila (HP. 085747965895); dan
 - b. Sdr. Khorl (HP. 081363169593).

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Sekretaris Jenderal, atas perhatian dan perkenan arahan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya
Manusia dan Organisasi,
Teguh Wahyudi

Tembusan:

1. Yth. Bapak Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Kepala Biro/Pusat;
3. Yth. Panitera Muda;
4. Yth. Inspektur;
5. Yth. Tim RB Pusat;
6. Yth. Tim RB Unit Kerja dan Asessor Unit Kerja;
7. Yth. Tim Evaluator RB Pusat.

